



PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah, Laut, Daerah Tingkat II dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pontianak 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 227);
7. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 234);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pagu pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada rencana strategis Perangkat Daerah dan RKPD.
- (2) Renja Perangkat Daerah tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kedua dari rencana strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 yang memuat evaluasi kinerja tahun sebelumnya, tujuan, dan sasaran, serta rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah.
- (3) Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025;
 - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (4) Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah tahun 2026.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah tahun 2026.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan tahun berjalan.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan keuangan dan laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada:
 - a. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan; dan

- c. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan keuangan dan laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan Perangkat Daerah.

BAB III VERIFIKASI, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan verifikasi, pengendalian, dan evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2026.
- (2) Verifikasi, pengendalian, dan evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. verifikasi Renja Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian kebijakan;
 - c. pengendalian pelaksanaan; dan
 - d. evaluasi hasil.

Pasal 7

- (1) Verifikasi Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a untuk menjamin program, kegiatan, dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Wali Kota tentang RKPD tahun 2026.
- (2) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b untuk menjamin bahwa Renja Perangkat Daerah telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan telah selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2026.
- (3) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada penyusunan RKPD tahun 2026.
- (4) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target, kinerja program/kegiatan mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang ditetapkan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah tahun 2026.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 7 Agustus 2025



Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 7 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,



BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PENJABARAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak;
2. Dinas Kesehatan Kota Pontianak;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak;
7. Dinas Sosial Kota Pontianak;
8. Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak;
9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak;
10. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak;
11. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
13. Dinas Perhubungan Kota Pontianak;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak;
15. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak;
17. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak;
19. Sekretariat Daerah Kota Pontianak;
20. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak;
21. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak;
22. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak;
23. Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak;
25. Inspektorat Kota Pontianak;
26. Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
27. Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak;
28. Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;
29. Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak;
30. Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
31. Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak; dan
32. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak.



WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO



2026

RENCANA KERJA



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PONTIANAK



RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PONTIANAK
TAHUN 2026



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja merupakan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan selama satu tahun, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Dokumen ini juga memuat evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan tahun lalu.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak ini merupakan operasionalisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah kedalam program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak sehingga memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program kegiatan Satuan Polisi Pamong Kota Pontianak secara keseluruhan.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2026 ini menjadi dasar bagi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.

Pontianak, 7 Agustus

2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang..... I-1

1.2 Landasan Hukum I-1

1.3 Maksud dan Tujuan..... I-5

1.4 Sistematika Penulisan I-5

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN
RENSTRAII-1**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian RenstraII-1

2.2 Analisis Kinerja PelayananII-10

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....II-13

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....II-14

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....II-17

BAB III TUJUAN DAN SASARAN III-1

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... III-1

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja... III-1

3.3 Program dan Kegiatan..... III-3

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN..... IV-1

Program dan Kegiatan..... IV-1

BAB V PENUTUP V-1

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2025 Kota PontianakII-2

Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan 2025 Kota PontianakII-8

Tabel II.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kota PontianakII-12

Tabel II.4 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2026 Kota PontianakII-13

Tabel III.1Daftar Rencana Aksi dan Sub Kegiatan Pengampu Tahun 2026..... III-4

Tabel III.2 Daftar Proyek Strategis dan Sub Kegiatan Tahun 2026 III-6

Tabel IV.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak IV-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 .Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Strategis sebagaimana diketahui merupakan rencana 5 (lima) tahunan yang diuraikan lebih lanjut ke dalam Rencana Tahunan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih fokus. Dengan adanya Rencana Kerja yang tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus. Rencana Kinerja ini antara lain berisikan ringkasan dari Rencana Strategis dan uraian lebih lanjut dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis serta strategi pencapaiannya.

Rencana Strategis menggambarkan tujuan jangka panjang, sasaran dan strategi- strategi. Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ini adalah dasar penyusunan penganggaran untuk tahun mendatang. Kaitan dengan anggaran tetap harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran dan tujuan serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem penganggaran. Anggaran suatu organisasi dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian - penyesuaian yang diperlukan sehingga sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya juga harus disesuaikan dengan perubahan anggaran tersebut. Untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 ini mengacu pada rancangan Renstra 2024 – 2026 tentunya disesuaikan dengan dinamika perubahan capaian kinerja tahun 2026 serta kemampuan penganggarnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2026 antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
17. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
19. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 39).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 10).
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 .Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2026 adalah :

- a. Sebagai acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dalam melaksanakan program dan kegiatan
- b. Memberikan informasi bagi para *stakeholders* tentang perencanaan program dan kegiatan di Satuan Polisi pamong Praja Kota Pontianak
- c. Mempermudah pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan
- d. Sebagai acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dalam menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertical dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2026 adalah :

- a. Menjadi tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
- b. Meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak

1.4 .Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2026 disusun menurut sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD. Bab ini terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2024

Berisi mengenai hasil pelaksanaan Rencana kerja SKPD tahun 2025 dan capaian renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Perangkat Daerah dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi telaahan terhadap tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini berisi uraian program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana penganggaran

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak pada tahun lalu (2024) dan perkiraan capaian pada tahun yang akan datang (tahun 2026) dengan mengacu pada APBD tahun berjalan yang telah ditetapkan. Selanjutnya hasil kajian tersebut dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak pada tahun lalu (2023) dari 2 Program dan 9 kegiatan serta perkiraan capaian pada tahun 2024 selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

A. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2025

Pencapaian realisasi belum bisa terpenuhi dikarenakan tahun pelaksanaan belum memasuki tahun 2025.

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kota Pontianak

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		100		100	95,01	95,01	100	195,01	65,00
1	5			`Q	Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		100		100	95,01	95,01	100	195,01	65,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan sekretariat	95		95	92,68	103,33	100	192,16	66,05
1	5	1	2	2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100		100	94,78	94,78	100	194,78	64,93

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5	1	2	5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100		100	99,68	99,68	100	199,68	66,56
1	5	1	2	6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100		100	93,88	93,88	100	193,88	64,63

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5	1	2	7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100		100	0	0	100	100	33,33
					Kegiatan Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100		100	96,71	96,71	100	196,71	65,57

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5	1	2	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100		100	72,74	72,74	100	172,74	57,58
1	5	1	2	9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100		100	98,29	98,29	100	198,29	66,10

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Penegakan PERDA dan PERKADA yang dapat diselesaikan secara Preventif dan Represif, Non Yustisi maupun Yustisi	100		100	94,19	94,19	100	194,19	64,73
1	5	2	2	1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	100		100	94,65	94,65	100	194,65	64,88

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5	2	2	2	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Jumlah laporan penyelenggaraan penegakan Perda dan Perwa	100		100	93,73	93,73	100	193,73	64,58
					PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		100		100	98,16	98,16	100	198,16	66,05

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	100	98,62	98,62	0	98,62	32,87
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100	100	97,70	97,70	0	97,70	32,57

2 .2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam bagian ini berisi kajian terhadap kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan. Adapun analisis kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak merujuk kepada penerapan prinsip koordinasi dan evaluasi laporan pertanggungjawaban, serta merumuskan indikator untuk mengukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak melalui Rencana Kerja (Renja).

Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2025
Kota Pontianak

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra 2024-2026 atau Renstra 2025-2029				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (tnn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	Tahun 2024 (tnn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2027 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)		(12)	(13)	(14)		(15)
1	Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	√	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan sekretariat	√	√	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	

3	Persentase Pelanggaran Penegakan PERDA dan PERKADA yang dapat diselesaikan secara Preventif dan Represif, Non Yustisi maupun Yustisi	√	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
---	--	---	---	------	------	------	------	------	------	------	------	--

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Tugas pokok dan fungsi yang utama dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak adalah Memelihara dan menyelenggarakan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan masyarakat, Menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Pontianak.

Permasalahan yang masih terjadi dalam masyarakat diantaranya adalah masih tingginya angka kriminalitas, angka pelanggaran Perda dan Perkada Kota Pontianak yang terjadi di masyarakat serta tahapan penegakan Perda dan Perkada Kota Pontianak masih dilakukan secara parsial. Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam rangka menciptakan stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, selain membutuhkan kompetensi aparatur penegak peraturan perundang-undangan, dalam hal ini fungsi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, juga diperlukan kontribusi, partisipasi dan dukungan semua unsur baik institusi terkait maupun dari segala komponen lapisan masyarakat

Oleh karena itulah maka isu strategis dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang secara tidak langsung dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak yaitu:

1. Masih banyak pelanggaran terhadap PERDA yang telah ditetapkan

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak saat ini mengalami peningkatan yang signifikan. Terbukti dari semakin menurunnya angka pelanggaran dan makin meningkatnya intensitas penegakan Peraturan Daerah serta penyelesaian pelanggaran K3. Namun demikian ada beberapa kendala, salah satu diantaranya adalah kurangnya kuantitas personil di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Adapun langkah-langkah yang diharapkan untuk tahun mendatang adalah penambahan jumlah personil di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Apabila hal tersebut dapat dipenuhi maka diharapkan perjanjian kinerja bertingkat dapat terealisasi secara maksimal.

Selain hal tersebut diatas, tantangan juga muncul dari perkembangan dinamika politik baik nasional maupun lokal serta peningkatan kecerdasan politik masyarakat yang terus berkembang semakin demokratis. Dinamika politik baik

nasional maupun lokal memberikan pengaruh terhadap dinamika pelaksanaan kegiatan internal di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Tantangan-tantangan tersebut diatas sekaligus juga merupakan peluang bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak untuk terus mengembangkan diri dalam memberikan *support* atau pelayanan kepada Pemerintah Kota Pontianak, sehingga kinerja Pemerintah Daerah menjadi lebih optimal. Optimalnya kinerja Pemerintah Kota Pontianak akan memberikan pengaruh pada kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pontianak yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan *good government* dan *good governance*.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada bagian ini disajikan review tentang perbandingan antara program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sesuai dengan kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Perbandingan tersebut dapat berupa kesesuaian program dan kegiatan dalam RKPD, program dan kegiatan baru, maupun besaran anggaran yang berbeda dengan usulan awal.

Perbandingan kesesuaian program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dengan rancangan awal RKPD selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel II.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Kota Pontianak

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan sekretariat	Kota Pontianak	100%	16.270.073.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan sekretariat	Kota Pontianak	100%	27.262.849.000
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	100%	15.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	100%	16.825.000
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	100%	12.718.223.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	100%	23.774.904.000
4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pontianak	100%	0.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	100%	9.375.000
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Pontianak	100%	530.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Pontianak	100%	475.925.000
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak	100%	628.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak	100%	628.500.000
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	100%	0.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	100%	420.000.000
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pontianak	100%	1,860,350,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pontianak	100%	1.413.620.000
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pontianak	100%	571.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pontianak	100%	571.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
10	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase Pelanggaran Penegakan PERDA dan PERKADA yang dapat diselesaikan secara preventif dan represif, non yustisi maupun yustisi	Kota Pontianak	100%	2.095.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase Pelanggaran Penegakan PERDA dan PERKADA yang dapat diselesaikan secara preventif dan represif, non yustisi maupun yustisi	Kota Pontianak	100%	2.115.000.000
11	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah/Kabupaten	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	Kota Pontianak	100%	1.465.000.000	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah/Kabupaten	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	Kota Pontianak	100%	1.475.000.000
12	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Jumlah laporan penyelenggaraan penegakan Perda dan Perwa	Kota Pontianak	100%	630.000.000	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Jumlah laporan penyelenggaraan penegakan Perda dan Perwa	Kota Pontianak	100%	620.000.000
JUMLAH					18.418.073.000	29.405.149.000				

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, masyarakat atau kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, SKPD lain yang terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Informasi dan usulan-usulan tersebut dapat diperoleh atau diserap melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), forum SKPD, dengar pendapat dengan masyarakat dan lain sebagainya.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah, tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak selaku organisasi perangkat daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, serta Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan lebih bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel II.4
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2026
Kota Pontianak

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Asmas dan Pokir	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nihil				
	dst.				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Prioritas pembangunan daerah tahun 2026, sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2026, yang terkait pada pembangunan adalah Meningkatkan Ketahanan, Ketertiban dan Keamanan Kota.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi dan menjadi ukuran kinerja. Tujuan akan menjadi arah perjalanan organisasi dalam beberapa tahun mendatang. Dengan demikian dalam pernyataan tujuan harus diungkapkan mengenai apa yang akan dicapai (What) dan kapan akan dicapai (When). Pernyataan tujuan bersifat lebih nyata, mengenai apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Pengungkapan tujuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak telah menyelaraskan apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta arah kebijakan yang diambil.

Tujuan penyelenggaraan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Meningkatnya Ketahanan, Ketertiban dan Keamanan Kota	Meningkatnya Situasi Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Kriminal	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

2. Sasaran

Sasaran atau obyektivitas organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal- hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan dan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis yang terkait juga telah dapat dicapai. Kemudian pada masing- masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk dapat mencapai sasaran yang terkait.

Dengan memperhatikan tujuan tersebut di atas dapat ditetapkan rumusan sasaran sebagai berikut :

Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran OPD
Meningkatnya situasi keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Tahun 2026 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
- Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Tabel III. 1
Daftar Rencana Aksi dan Sub Kegiatan Pengampu
Tahun 2026

No	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Volume	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Melaksanakan pelatihan satlinmas	180.000.000,00	12 Dokumen	Kota Pontianak	
2	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Melaksanakan bimtek	0,00	164 orang	Kota Pontianak	
3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Melakukan kerjasama	515.000.000,00	12 Dokumen	Kota Pontianak	
4	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Melakukan deteksi dini, patroli, pengamanan dan pengawasan	375.000.000,00	300 Kasus	Kota Pontianak	
5	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	405.000.000,00	260 Kasus	Kota Pontianak	

6	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Melakukan dan menjaga ketentraman, ketertiban umum dan keamanan masyarakat	0.00	1 Dokumen	Kota Pontianak	
7	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	175.000.000,00	6 Laporan	Kota Pontianak	
8	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Melakukan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	330.000.000,00	12 Laporan	Kota Pontianak	
9	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	125.000.000,00	12 Laporan	Kota Pontianak	

Tabel III. 2
Daftar Proyek Strategis dan Sub Kegiatan Pengampu
Tahun 2026

No	Sub Kegiatan	Proyek Strategis	Anggaran	Volume	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan taat hukum melalui peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum	180.000.000,00	12 Dokumen	Kota Pontianak	
2	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Meningkatkan kompetensi aparatur Satpol PP dan Satlinmas, dengan fokus pada pelaksanaan tugas yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia	0,00	164 orang	Kota Pontianak	
3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Fokus pada penguatan sinergi dengan berbagai instansi terkait dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum melalui berbagai teknik pencegahan dan penanganan gangguan	515.000.000,00	12 Dokumen	Kota Pontianak	
4	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Menciptakan kondisi wilayah yang aman, kondusif, dan terawasi melalui berbagai upaya seperti deteksi dini, cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawasan	375.000.000,00	300 Kasus	Kota Pontianak	
5	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada), serta menangani unjuk rasa dan kerusuhan massa secara efektif.	405.000.000,00	260 Kasus	Kota Pontianak	

6	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Melakukan dan menjaga ketentraman, ketertiban umum dan keamanan masyarakat	0.00	1 Dokumen	Kota Pontianak	
7	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat serta aparatur di tingkat bawah terhadap peraturan daerah, demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang efektif.	175.000.000,00	6 Laporan	Kota Pontianak	
8	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Fokus pada penegakan hukum, penertiban, dan pemeliharaan ketenteraman serta ketertiban umum di daerah, yang diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP dan dokumen perencanaan lainnya	330.000.000,00	12 Laporan	Kota Pontianak	
9	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	memastikan penegakan hukum daerah berjalan efektif dan menjaga ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat	125.000.000,00	12 Laporan	Kota Pontianak	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2026 diperlukan rumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan. Rumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2026 terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunan antara lain :

1. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang Ketentraman dan ketertiban umum.
2. Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan.

Secara garis besar rumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Program/kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2026 merupakan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan kualitas dan akses pelayanan di Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebanyak 2 program di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.
3. Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026 sebanyak 7 kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.
4. Kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2026 yang bersumber dari dana APBD Kota Pontianak, Program dan kegiatan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2026 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagaimana Tabel berikut :

Tabel IV.I
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kota Pontianak
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target		Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						29.377.849.000,00							0,0			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						29.377.849.000,00							0,0			
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						29.377.849.000,00							0,0			
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen			95 Persen	27.262.849.000,00							0,0			
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 Persen			100 Persen	15.000.000,00							0,0			
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	15.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		

	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan			15 Laporan	9.375.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0.0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen			100 Persen	23.549.849.000,00			-	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	-		0,0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	178 Orang/bulan			178 Orang/bulan	23.549.849.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	-		0,0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			12 Dokumen	215.680.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0.0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72 Laporan			72 Laporan	9.375.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen		100 Persen	9.375.000,00						0.0	
	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan			10 Laporan	9.375.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0.0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	530.000.000,00			-	-	-	0,0	
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket			2 Paket	380.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian												
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	18 Dokumen			18 Dokumen	9.375.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI				0.0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

													DAERAH (PAD)						
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	164 Orang			164 Orang	20.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	178 Orang			178 Orang	150.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen			100 Persen	628.500.000,00			-	-	-		0,0
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	7.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	60.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	400.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	40.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen			36 Dokumen	6.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	115.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen			100 Persen	420.000.000,00							0.0	
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit			2 Unit	400.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	[DANA UMUM] - PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)					0.0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	20.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	[DANA UMUM] - PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)					0.0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen			100 Persen	1.995.800.000,00			-	-	-		0,0	
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	53.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Des	[DANA UMUM] - PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	1.942.800.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen			100 Persen	571.000.000,00			-	-	-		0,0	
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit			36 Unit	520.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit			28 Unit	51.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran penegakan PERDA dan PERKADA yang dapat diselesaikan secara preventif dan represif, non Yustisi maupun Yustisi	100 Persen			100 Persen	2.115.000.000,00							0,0	
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	100 persen			100 persen	1.495.000.000,00			-	-	-		0,0	

	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum													
						Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen			12 Dokumen	180.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia													
						Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	178 Orang			178 Orang	20.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum													
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen			12 Dokumen	515.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Des	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan													
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,	300 Kasus			300 Kasus	375.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

						Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan													
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa													
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	260 Kasus			260 Kasus	405.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0019	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota													
						Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	1 Dokumen			1 Dokumen	0.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0.0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Jumlah laporan penyelenggaraa n penegakan Perda dan Perwa	100 persen		100 persen	620.000.000,00			-	-	-		0,0	
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan			6 Laporan	175.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan			12 Laporan	320.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan			12 Laporan	125.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kot a	12 Laporan			12 Laporan	0.00							0.0		
	1	05	02	2.03	0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS														
						Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	12 Laporan			12 Laporan	0.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0.0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	J U M L A H										29.405.149.000,00								0,0	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Output Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Pontianak adalah Program Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Pontianak yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tujuan serta sasaran dalam upaya mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Pontianak.

Selain menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026, Renja berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Pontianak. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

5.1. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Pontianak Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Hal itu sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas pokok dan kewenangan pada masing – masing bidang;
- b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- c. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

5.2. RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2026, selanjutnya Renja akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Pontianak, 7 Agustus 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Pontianak



Drs. Ahmad Sudiyantoro

Pembina Tk. I

NIP. 19690312 199703 1 009

BAB V PENUTUP

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak tahun 2025-2029 dan mengacu kepada Rencan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak tahun 2026

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak sebagai upaya mendukung visi dan misi Wali Kota Pontianak dan Wakil Wali Kota Pontianak. Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kota Pontianak. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Tahun 2026 ini serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan Angka Konflik, Indeks Kota Toleran (IKT), Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Pontianak.

Pontianak, 7 Agustus 2025


KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PONTIANAK

AHMAD HASYM, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 196806151998031009

WALI KOTA PONTIANAK,


EDY JUSDI KAMTONO